

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KUPANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang adalah dokumen perencanaan teknis sebagai tindak lanjut dari dokumen RPJMD Kota Kupang 2023-2026.

Renja tahun 2023 ini disusun untuk dipedomani oleh pimpinan dan staf DP3A dan semua OPD terkait serta semua pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam jangka waktu 2023-2026. Disamping itu Renja tahun 2023 ini disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada serta yang mungkin timbul dikemudian hari.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan terhadap penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang tahun 2023. Demi kesempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, kami tetap menerima saran dan masukan demi perbaikan kearah yang lebih baik.

Kupang, Maret 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Kupang



Ir. Clementina R. N. Soengkono

Pembinng Litigasi Muda

Nip. 19640531 199001 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daeah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	36
3.3 Program dan Kegiatan	37
BAB IV P E N U T U P	46

DAFTAR TABEL

Tabel. T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 202221

Tabel 1Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 202439

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan langkah – langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Startegis Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Secara hirarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya sebagai dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani Antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2021 menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang Tahun 2022. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Kupang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang Tahun 2022, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain :

1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Nomor 3633);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Tahun 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 Menteri Dalam Negeri (Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 197);
17. Peraturan Walikota Kupang Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang;
18. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang Tahun 2023 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan anggaran Tahun 2023;
2. Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023;
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, yaitu TA.2021;
4. Menjadi acuan dalam Penyusunan Renja OPD ditahun selanjutnya.

Tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang adalah :

1. Tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang;
2. Terlaksananya program dan kegiatan Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang;
3. Meningkatnya capaian target program dan kegiatan tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Rancangan Renja OPD Tahun Anggaran 2023, mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daeah

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang Tahun 2023 – 2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dikaitkan juga dengan pencapaian target Restra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang Tahun 2023 – 2026, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun – tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Restra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.

Berikut Realisasi program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang tahun 2021 :

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.470.903.547	2.996.442.770	86,33
I.I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.075.350	54.282.750	93,47
I.I.I	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.583.400	91,67
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52.100.000	‘-	0
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	127.600	127.600	100
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	354.500	‘-	0
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	295.800	295.800	100

5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.170.000	4.170.000	100
I.I.II	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.978.100	19.996.300	95,32
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	255.200	255.200	100
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	348.500	‘	0
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	443.700	443.700	100
4.	Belanja Lembur	5.390.000	5.265.000	97,68
5.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.840.700	11.382.400	96,13
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000	2.650.000	98,15
I.I.III	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.647.450	7.610.000	88,00
1.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	344.300	‘	0
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	191.400	‘	0
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	431.750	‘	0
4.	Belanja Lembur	3.900.000	3.900.000	100
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.780.000	3.710.000	98,15
I.I.IV	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.554.850	7.705.200	90,07
1.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	255.000	‘	0
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	255.200	255.200	100
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	574.650	‘	0
4.	Belanja Lembur	4.020.000	4.020.000	100
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.450.000	3.430.000	99,42
I.I.V	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.439.950	7.394.950	99,40
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	130.200	130.200	100
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	244.750	244.750	100
3.	Belanja Lembur	3.005.000	2.970.000	98,84
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.060.000	4.050.000	100
I.II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.752.218.145	2.305.944.324	83,78
I.II.I	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.665.835.100	2.223.061.929	83,39
1.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.468.373.500	1.227.345.980	83,59

2.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	113.227.800	102.123.984	90,19
3.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	229.950.000	172.110.000	74,85
4.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12.810.000	12.810.000	100
5.	Belanja Tunjangan Beras PNS	99.506.400	12.810.000	12,87
6.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.862.200	4.909.073	101
7.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.600	16.109	82,19
8.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	60.994.800	52.618.946	86,27
9.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.960.400	2.555.442	86,32
10.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.878.800	7.666.395	86,34
11.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	6.651.600	0	0
12.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	657.600.000	561.117.500	85,33
I.II.II	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.350.000	22.350.000	100
1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.000.000	15.000.000	100
2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.750.000	3.750.000	100
3.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.600.000	3.600.000	100
I.II.III	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	16.662.500	15.594.100	93,59
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	314.500	314.500	100
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	405.600	405.600	100
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	366.500	366.500	100
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.065.900	0	0
5.	Belanja Lembur	6.050.000	6.047.500	100
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.460.000	8.460.000	100
I.II.IV	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.716.500	8.815.000	90,72

1.	Belanja Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	881.500	-	0
2.	Belanja Lembur	4.725.000	4.725.000	100
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.110.000	4.090.000	100
I.II.V	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.438.250	1.795.800	73,65
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	191.400	-	0
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	451.050	-	0
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	295.800	295.800	100
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000	100
I.II.VI	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.215.995	30.193.495	100
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	703.600	703.600	100
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	990.750	990.750	100
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	591.600	591.600	100
4.	Belanja Lembur	5.100.000	5.097.500	100
5.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.690.045	11.690.045	100
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.140.000	11.120.000	100
I.II.VII	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.999.800	4.134.000	82,68
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	462.300	-	0
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	204.000	204.000	100
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	373.500	-	0
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.960.000	3.930.000	99,24
I.III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.999.950	19.373.850	96,87

I.III.I	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	4.891.400	97,83
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	232.500	232.500	100
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	108.600	-	0
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	548.900	548.900	100
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.110.000	4.110.000	100
I.III.II	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	4.810.000	96,20
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	20.000	-	0
2.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.980.000	4.810.000	96,59
I.III.II	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.999.950	4.692.450	93,85
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	412.200	412.200	100
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	57.600	-	0
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	310.150	60.250	19,43
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.220.000	4.220.000	100
I.III.IV	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	4.980.000	99,60
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	222.100	222.100	100
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	275.400	275.400	100
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	102.500	102.500	100
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.400.000	4.380.000	99,55
I.IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.591.350	23.174.150	98,23

I.IV.I	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.888.100	11.500.900	96,74
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	661.400	324.200	49,02
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	693.000	693.000	100
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	560.000	560.000	100
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	443.700	443.700	100
5.	Belanja Lembur	5.390.000	5.390.000	100
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.140.000	4.090.000	98,79
I.IV.II	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	11.703.250	11.673.250	100
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	723.250	723.250	100
2.	Belanja Lembur	4.680.000	4.660.000	100
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.300.000	6.290.000	100
I.V	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.762.800	58.854.600	93,77
I.V.I	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.495.400	2.495.400	100
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.495.400	2.495.400	100
I.V.II	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.482.000	28.482.000	100
1.	Belanja Modal Alat Dapur	110.000	110.000	100
2.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	605.000	605.000	100
3.	Belanja Modal Personal Computer	27.767.000	27.767.000	100
I.V.III	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.180.700	17.180.700	100
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.180.700	17.180.700	100
I.V.IV	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.165.000	2.110.000	97,46
1.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.165.000	2.110.000	97,46
I.V.V	Penyediaan Bahan/Material	18.458.900	18.388.300	99,62

1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.559.900	7.559.900	100
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.566.400	4.566.400	100
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.070.600	2.000.000	96,59
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.328.000	3.328.000	100
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	475.000	475.000	100
6.	Belanja Obat-Obatan-Obat	459.000	459.000	100
I.V.VI	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.462.800	16.680.200	74,26
1.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	22.462.800	16.680.200	74,26
I.VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.164.552	415.019.501	97,61
I.VI.I	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.999.500	4.093.000	81,87
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.099.500	4.093.000	99.84
I.VI.II	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.742.092	31.459.000	96,08
1.	Belanja Tagihan Telepon	-	-	0
2.	Belanja Tagihan Air	2.400.000	1.200.000	50,00
3.	Belanja Tagihan Listrik	30.342.092	30.259.000	99.73
I.VI.III	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.050.000	3.800.000	41,99
1.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.000.000	3.000.000	100
2.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.000.000	600.000	12,00
3.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.050.000	200.000	19,05
I.VI.IV	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	379.272.960	375.667.501	99,05
1.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	361.350.000	359.342.500	99,44

2.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.454.000	14.373.700	99,44
3.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	867.240	867.240	100
4.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.601.720	1.084.061	41,67
I.VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.609.400	93.311.595	92,75
I.VII.I	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.258.400	34.066.500	96,62
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	28.788.400	28.776.000	99,96
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.000	-	0
3.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.200.000	1.040.500	47,30
4.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.850.000	3.850.000	100
5.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	400.000	400.000	100
I.VII.II	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.475.100	36.321.795	94,40
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31.973.350	31.166.000	97,47
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.750	-	0
3.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.400.000	1.085.795	45,24
4.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.500.000	3.450.000	98,57
5.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	600.000	600.000	100

I.VII.III	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.905.900	1.953.300	33,07
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.705.900	1.953.300	34,23
2.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	200.000	-	0
I.VII.IV	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.970.000	20.970.000	100
1.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.970.000	20.970.000	100
II.	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	57.026.200	57.026.200	100
II.I	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	22.859.100	22.859.100	100
II.I.I	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	22.859.100	22.859.100	100
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	124.300	124.300	100
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	169.900	169.900	100
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	903.000	903.000	100
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	147.900	147.900	100
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.564.000	1.564.000	100
6.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.100.000	8.100.000	100
7.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.850.000	5.850.000	100
8.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.000.000	6.000.000	100
II.II	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	34.167.100	34.167.100	100

	Kabupaten/Kota			
II.II.I	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	34.167.100	34.167.100	100
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.047.000	5.047.000	100
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.294.600	2.294.600	100
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.295.900	1.295.900	100
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	795.600	795.600	100
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.043.000	4.043.000	100
6.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.700.000	4.700.000	100
7.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.791.000	9.791.000	100
8.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.200.000	3.200.000	100
9.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000	3.000.000	100
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	322.642.570	171.584.700	53,18
III.I	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	122.907.070	117.386.700	96
III.I.I	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	35.821.820	35.719.450	99,71
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.591.370	1.589.000	99,85
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	917.750	917.750	100
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	770.100	770.100	100
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.400.000	1.400.000	100
5	Belanja Makanan dan Minuman	4.822.600	4.822.600	100

	Rapat			
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.400.000	6.400.000	100
7	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5.000.000	5.000.000	100
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.020.000	6.920.000	98,58
9	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.900.000	7.900.000	100,0
III.I.II	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	87.085.250	81.667.250	93,78
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.343.500	1.470.500	62,75
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.450.000	1.399.000	96,48
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.047.250	1.547.250	38,23
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	739.500	739.500	100
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.065.000	16.881.000	98,92
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.220.000	21.600.000	93,02
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.220.000	22.030.000	99,14
8	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.000.000	16.000.000	100
III.II	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	119.735.500	54.198.000	45,26
III.II.I	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	119.735.500	54.198.000	45,26
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	60.100	-	0

2	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	31.500.000	14.700.000	46,67
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.075.400	19.698.000	44,69
4	Belanja Jasa Tenaga Ahli	54.000.000	19.800.000	36,67
5	Belanja Medical Check Up	17.210.000	-	0
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.890.000	-	0
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	86.178.400	85.542.895	99,26
IV.I	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.178.400	85.542.895	99,26
IV.I.I	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	86.178.400	85.542.895	99,26
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	793.300	793.300	100
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	452.000	452.000	100
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.525.200	1.525.200	100
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.142.400	1.142.400	100
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.907.500	3.907.500	100
6	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	27.000.000	27.000.000	100
7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.108.000	7.108.000	100
8	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.100.000	9.100.000	100
9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.570.000	21.934.495	97,18
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	6.580.000	6.580.000	100

	Kota			
11	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.000.000	6.000.000	100
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	44.309.400	44.309.400	100
V.I	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.309.400	44.309.400	100
V.I.I	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	44.309.400	44.309.400	100
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	255.500	255.500	100
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.248.500	9.248.500	100
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	295.800	295.800	100
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000	4.000.000	100
5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.600.000	8.600.000	100
6	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.010.000	3.010.000	100
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.900.000	18.900.000	100
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	140.674.500	140.606.800	99,95
VI.I	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	140.674.500	140.606.800	99,95
VI.I.I	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	140.674.500	140.606.800	99,95
1	Belanja Alat/Bahan untuk	1.731.000	1.731.000	100

	Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.277.200	1.277.200	100
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.883.000	4.883.000	100
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	739.500	739.500	100
5	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	27.750.000	27.750.000	100
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.338.800	8.338.800	100
7	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.800.000	17.800.000	100
8	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.500.000	1.500.000	100
9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.385.000	17.377.300	99,96
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.120.000	31.060.000	99,81
11	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.500.000	20.500.000	100
12	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7.650.000	7.650.000	100
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	224.831.000	169.592.700	75,43
VII.I	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	92.657.500	89.929.700	97,06
VII.I.I	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60.019.500	57.291.700	95,46
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	654.100	654.100	100
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	760.000	466.200	61,34
3	Belanja Alat/Bahan untuk	1.508.500	1.508.500	100

	Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	147.900	147.900	100
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.750.000	4.750.000	100
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.500.000	21.500.000	100
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.299.000	10.175.000	82,73
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.900.000	6.590.000	95.51
9	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.500.000	11.500.000	100
VII.I.II	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	32.638.000	32.638.000	100
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.481.800	1.481.800	100
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.472.000	1.472.000	100
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	622.200	622.200	100
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.050.000	1.050.000	100
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.412.000	4.412.000	100
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000	5.400.000	100
7	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	8.000.000	8.000.000	100
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000	2.700.000	100
9	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.500.000	7.500.000	100
V.I.III	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	132.173.500	79.663.000	60.27
1	Belanja Persediaan untuk	30.084.000	17.584.000	58.45

	Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.599.500	23.079.000	70.80
3	Belanja Jasa Tenaga Ahli	23.400.000	23.400.000	100
4	Belanja Medical Check Up	20.190.000	-	0
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.900.000	15.600.000	60.23

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2022 diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal meningkat dari tahun 2021 baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Untuk dapat mencapai keberhasilan kinerja seperti yang diharapkan maka perlu dilakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Kupang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Rekening			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
01	2.01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	1	100	1	3	3
01	2.01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	2	100	2	6	3
01	2.01	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	2	2	100	2	6	3
01	2.01	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	2	2	100	2	6	3
01	2.01	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	2	2	100	2	6	3

Kode Rekening			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	2.01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	2	100	2	6	3
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
01	2.02	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	14	14	100	14	42	3
01	2.02	2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyedia administarsi pelaksana tugas ASN	4	4	4	4	100	4	12	3
01	2.02	2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi keuangan SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3
01	2.02	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3
01	2.02	2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	1	1	1	100	1	3	3
01	2.02	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	19	19	19	19	100	19	57	3

Kode Rekening			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	2.02	2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan anlisis prognosis reaslisasi anggaran	1	1	1	1	100	1	3	3
01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
01	2.03	2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3
01	2.03	2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian barang milik daerah SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3
01	2.03	2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3
01	2.03	2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3
01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
01	2.05	2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1	1	1	1	100	1	3	3
01	2.05	2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1	1	1	1	100	1	3	3

Kode Rekening			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksannya administrasi umum perangkat daerah								
01	2.06	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	1	1	1	100	1	3	3
01	2.06	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	1	1	100	1	3	3
01	2.06	2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1	1	1	1	100	1	3	3
01	2.06	2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan/material	1	1	1	1	100	1	3	3
01	2.06	2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1	1	1	1	100	1	3	3
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah								
01	2.08	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	1	1	1	1	100	1	3	3
01	2.08	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1	1	1	1	100	1	3	3
01	2.08	2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	1	1	100	1	3	3
01	2.08	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	1	1	1	1	100	1	3	3
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya pemeliharaan barang milik daerah								
01	2.09	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3	3	3	3	100	3	9	3

Kode Rekening			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	2.09	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasioanal atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan parizinannya	3	3	3	3	100	3	9	3
01	2.09	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1	1	1	1	100	1	3	3
01	2.09	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	3	3
02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan, DPRD dan Lembaga Swasta								
02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersediannya Lembaga PUG yang Aktif pada Lembaga Pemerintahan								
02	2.01	2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100	1	3	3
02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif								

Kode Rekening			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02	2.02	2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100	1	3	3
03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Peningkatan Cakupan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan								
03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan								
03	2.01	2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100	1	3	3
03	2.01	2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	0	30	30	100	30	60	2

Kode Rekening			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersediannya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO								
03	2.02	2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	0	25	25	100	25	50	2
04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan cakupan Ketahanan Keluarga								
04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga								
04	2.01	2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100	1	3	3
05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan ketersediaan dan Pemanfaatan Data gender dan anak								
05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data gender dan anak								
05	2.01	2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	1	1	1	100	1	3	3

Kode Rekening			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Cakupan Kota Layak Anak								
06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
06	2.02	2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100	1	3	3
07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Komprehensif								
07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya Program Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak								
07	2.01	2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30	30	30	30	100	30	90	3

Kode Rekening			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
07	2.01	2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	0	1	1	100	1	2	2
07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus								
07	2.02	2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	35	0	35	35	100	35	70	2

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang dan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang mempunyai tugas pokok, membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang;
- b. Pelaksanaan Kebijakan daerah Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Daerah di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Kupang;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Daerah di Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsi lainnya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, ada beberapa indikator kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut :

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur;
2. Peningkatan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peningkatan Pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);

Dari Indikator Kinerja diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang berupaya untuk meningkatkan kualitas aparatur melalui pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat, bimtek, workshop, sosialisasi dan seminar dan untuk meingkatkan sistim manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan meningkatkan pendataan dan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perempuan dan anak. Disamping itu juga diharapkan dengan keterampilan yang dimiliki dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penentuan isu – isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu – isu strategis dengan tepat, pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak – pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu – isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal – hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal – hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak serta menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan dalam mewujudkan program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan telaahan Rencana Strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu – isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.

Isu – isu strategis yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang adalah :

- 1) Masih rendahnya Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- 2) Masih rendahnya Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender;
- 3) Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang belum sepenuhnya aktif;
- 4) Banyaknya Perangkat Daerah yang belum memiliki sistim data gender dan anak;
- 5) Masih rendahnya persentase keterlibatan perempuan dalam politik/lembaga legislative dan sektor publik;
- 6) Masih rendahnya peran keluarga yang berbasis kesetaraan gender dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- 7) Masih rendahnya persentase keterlibatan perempuan dalam peningkatan perekonomian keluarga;
- 8) Belum tersedianya Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga;
- 9) Masih kurangnya jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan anak;
- 10) Masih rendahnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dalam pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak;
- 11) Masih kurangnya ketersediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang pemberdayaan perempuan dan anak;
- 12) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- 13) Belum tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan dan anak Korban Kekerasan;
- 14) Belum tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan anak Korban Kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 15) Belum efektifnya Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 16) Belum adanya sarana pendukung untuk menampung anak korban kekerasan, anak berhadapan hukum dan disabilitas;
- 17) Masih kurangnya lembaga pengasuhan alternatif ramah anak yang sesuai standar;
- 18) Masih rendahnya implementasi kebijakan pemenuhan hak anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha;
- 19) Masih rendahnya penanganan tenaga kerja anak.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan, menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai bidang pembangunan;
2. Meningkatkan pemahaman perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender;
3. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menyediakan sistem data gender dan anak melalui pokja PUG serta focal point yang ada di masing-masing perangkat daerah;

4. Memperkuat sistem penyediaan, pemutahiran dan pemanfaatan data pilah gender;
5. Meningkatkan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dalam kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader/calon legislative serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif;
6. Meningkatnya peran keluarga dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berbasis gender;
7. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam peningkatan perekonomian keluarga;
8. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan melalui koordinasi lintas sektoral dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
9. Memperkuat mekanisme kerja sama antara pemangku kepentingan dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
10. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan;
11. Meningkatkan komitmen dan pemahaman pemangku kepentingan terkait perlindungan khusus anak termasuk pada AMPK;
12. Meningkatkan kualitas lembaga layanan pengasuhan alternatif termasuk SDM nya yang ramah anak dan sesuai standar;
13. Meningkatkan komitmen dan pemahaman stakeholder tentang pentingnya pemenuhan hak anak melalui KLA.

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
- 2) Masih rendahnya Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender
- 3) Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang belum sepenuhnya aktif
- 4) Masih rendahnya presentasi keterlibatan perempuan dalam politik/lembaga legislative
- 5) Masih rendahnya presentasi keterlibatan perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga
- 6) Masih kurangnya jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan
- 7) Rendahnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dalam pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan

- 8) Belum tersedianya media komunikasi informasi dan edukasi tentang pemberdayaan perempuan dan anak
- 9) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
- 10) Belum tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan
- 11) Belum tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
- 12) Belum efektifnya Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
- 13) Banyaknya Perangkat Daerah yang belum memiliki sistem data gender dan anak
- 14) Belum tersedianya Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga
- 15) Masih tingginya jumlah kekerasan terhadap anak
- 16) Masih kurangnya lembaga pengasuhan alternatif ramah anak yang sesuai standar
- 17) Masih rendahnya implementasi kebijakan pemenuhan hak anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
- 18) Belum tersediannya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
- 19) Belum efektifnya Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak melalui PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) dan PUG (Pengarusutamaan Gender) meliputi upaya-upaya penanganan isu-isu strategis Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi :

1. Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan di berbagai bidang Pembangunan;
2. Peningkatan Akses Pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup;
3. Peningkatan kerjasama dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Peningkatan perlindungan hak perempuan;
5. Peningkatan Perlindungan khusus anak;
6. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;

Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara Nasional dan di Daerah dilaksanakan dalam kerangka Peningkatan kualitas hidup perempuan menuju Kesetaraan Gender dan Peningkatan perlindungan Anak menuju KLA (World Fit For Children) dilaksanakan dengan strategi :

1. Penguatan kelembagaan PUG dengan fokus pada percepatan penerapan implementasi PPRG dalam perangkat daerah;
2. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan PUG;
3. Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dengan fokus pada percepatan penyusunan perda perlindungan perempuan termasuk TPPO;
4. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan korban tindak kekerasan dengan fokus pada penanganan wilayah;
5. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan disemua bidang;
6. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan;
7. Penguatan sistim penyediaan, pemutahiran dan pemanfaatan data pilah gender dengan fokus pada sistim responsif gender;
8. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan implementasi KLA peningkatan penguatan lembaga layanan pengasuhan alternatif yang ramah anak yang sesuai standar dengan fokus pada sarana prasarana dan SDM;

9. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam menyediakan sistim data gender dan anak melalui pokja pug serta focal point yang ada di masing - masing perangkat daerah;
10. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan sesuai standar dengan fokus implementasi PATBM.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan 1 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) dibanding dengan indeks pembangunan gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) dibandingkan Indeks Pemberdayaan Gender

2. Meningkatnya kualitas perlindungan hak perempuan

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama dibandingkan dengan Prevelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan diatas 18 tahun

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran yang ini diukur dengan indikator kinerja utama dibandingkan dengan persentase Kabupaten/Kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kelurahan yang mampu memenuhi hak anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama dibandingkan dengan persentase Kelurahan Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama :

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar

2) Persentase Kelurahan yang menindaklanjuti seluruh (100%)pengaduan kasus anak yang mebutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama dibandingkan dengan persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu meberikan layanan komprehensif sesuai standar.

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebgai berikut :

- Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan masyarakat serta akademisis an lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama dibanding dengan persentase partisipasi lembaga masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang disusun. Didalam proses rencana kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang mendefenisikan seluruh sasaran strategis, program dan kegiatan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan terget kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang untuk mencapainya dalam satu tahun dan merupakan tolok ukur (brancmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode. Adapun rincian rencana kegiatan perprogram serta indikator

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang ini disusun berdasarkan potensi dan keadaan yang ada serta untuk mendukung terwujudnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja ini berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang yang berpedoman pada Rencana Strategi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran Visi Misi Kota Kupang, hal ini dimaksudkan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara sistematis, terarah dan berkesinambungan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Kupang yang dibiayai oleh APBD Kota Kupang dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahunan 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			C	3,973,114,688	APBD		B	4,132,039,276
01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Kpg	100%	63,440,000	APBD		100%	65,977,600
01	2.01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Kpg	1	9,880,000	APBD			1	10,275,200
01	2.01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Kpg	2	10,400,000	APBD			2	10,816,000
01	2.01	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Kpg	2	12,480,000	APBD			2	12,979,200
01	2.01	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Kpg	2	10,400,000	APBD			2	10,816,000
01	2.01	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Kpg	2	12,480,000	APBD			2	12,979,200
01	2.01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kpg	2	7,800,000	APBD			2	8,112,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahunan 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Kpg	100%	3,276,031,808	APBD		100%	3,407,073,081
01	2.02	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Kpg	14	3,215,293,728	APBD		14	3,343,905,478
01	2.02	2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyedia administarsi pelaksana tugas ASN	Kota Kpg	4	29,018,080	APBD		4	30,178,803
01	2.02	2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi keuangan SKPD	Kota Kpg	1	7,800,000	APBD		1	8,112,000
01	2.02	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Kpg	1	7,800,000	APBD		1	8,112,000
01	2.02	2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Kpg	1	5,200,000	APBD		1	5,408,000
01	2.02	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Kpg	19	8,320,000	APBD		19	8,652,800
01	2.02	2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan anlisis prognosis realisasi anggaran	Kota Kpg	1	2,600,000	APBD		1	2,704,000
01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Kpg	100%	21,840,000	APBD		100%	22,713,600
01	2.03	2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Kpg	1	5,720,000	APBD		1	5,948,800
01	2.03	2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian barang milik daerah SKPD	Kota Kpg	1	5,720,000	APBD		1	5,948,800
01	2.03	2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kota Kpg	1	5,200,000	APBD		1	5,408,000
01	2.03	2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kota Kpg	1	5,200,000	APBD		1	5,408,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahunan 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Kpg	100%	16,120,000	APBD		100%	16,764,800
01	2.05	2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kota Kpg	1	7,800,000	APBD		1	8,112,000
01	2.05	2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Kota Kpg	1	8,320,000	APBD		1	8,652,800
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksannnya administrasi umum perangkat daerah	Kota Kpg	100%	52,520,000	APBD		100%	54,620,800
01	2.06	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Kpg	1	5,720,000	APBD		1	5,948,800
01	2.06	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Kpg	1	10,400,000	APBD		1	10,816,000
01	2.06	2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Kpg	1	10,400,000	APBD		1	10,816,000
01	2.06	2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan/material	Kota Kpg	1	15,600,000	APBD		1	16,224,000
01	2.06	2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kota Kpg	1	10,400,000	APBD		1	10,816,000
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Kpg	100%	433,442,880	APBD		100%	450,780,595
01	2.08	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kpg	1	7,800,000	APBD		1	8,112,000
01	2.08	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Kpg	1	20,800,000	APBD		1	21,632,000
01	2.08	2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Kpg	1	10,400,000	APBD		1	10,816,000
01	2.08	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	Kota Kpg	1	394,442,880	APBD		1	410,220,595

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahunan 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya pemeliharaan barang milik daerah	Kota Kpg	100%	109,720,000	APBD		100%	114,108,800
01	2.09	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Kpg	3	41,600,000	APBD		3	43,264,000
01	2.09	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasioanal atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan parizinannya	Kota Kpg	3	41,600,000	APBD		3	43,264,000
01	2.09	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Kpg	1	5,720,000	APBD		1	5,948,800
01	2.09	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharah / Direhabilitasi	Kota Kpg	1	20,800,000	APBD		1	21,632,000
02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan, DPRD dan Lembaga Swasta	Kota Kpg	100%	104,000,000	APBD		100%	108,160,000
02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersediannya Lembaga PUG yang Aktif pada Lembaga Pemerintahan	Kota Kpg	100%	52,000,000	APBD		100%	54,080,000
02	2.01	2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Kpg	1	52,000,000	APBD		1	54,080,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahunan 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif	Kota Kpg	100%	52,000,000	APBD		100%	54,080,000
02	2.02	2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Kpg	1	52,000,000	APBD		1	54,080,000
03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Peningkatan Cakupan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Kota Kpg	100%	187,200,000	APBD		100%	194,688,000
03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Kota Kpg	100%	119,600,000	APBD		100%	124,384,000
03	2.01	2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Kpg	1	52,000,000	APBD		1	54,080,000
03	2.01	2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Kpg	30	67,600,000	APBD		30	70,304,000
03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersediannya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	Kota Kpg	100%	67,600,000	APBD		100%	70,304,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahunan 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	2.02	2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Kpg	25	67,600,000	APBD		25	70,304,000
04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan cakupan Ketahanan Keluarga	Kota Kpg	100%	67,600,000	APBD		100%	70,304,000
04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	Kota Kpg	100%	67,600,000	APBD		100%	70,304,000
04	2.01	2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Kpg	1	67,600,000	APBD		1	70,304,000
05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan ketersediaan dan Pemanfaatan Data gender dan anak	Kota Kpg	100%	57,200,000	APBD		100%	59,488,000
05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data gender dan anak	Kota Kpg	100%	57,200,000	APBD		100%	59,488,000
05	2.01	2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Kpg	1	57,200,000	APBD		1	59,488,000
06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Cakupan Kota Layak Anak	Kota Kpg	100%	67,600,000	APBD		100%	70,304,000
06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Kpg	100%	67,600,000	APBD		100%	70,304,000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahunan 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	2.02	2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Kpg	1	67,600,000	APBD		1	70,304,000
07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Kota Kpg	100%	176,800,000	APBD		100%	183,872,000
07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya Program Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Kota Kpg	100%	98,800,000	APBD		100%	102,752,000
07	2.01	2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Kpg	30	57,200,000	APBD		30	59,488,000
07	2.01	2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Kpg	1	41,600,000	APBD		1	43,264,000
07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Kpg	100%	78,000,000	APBD		100%	81,120,000
07	2.02	2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Kpg	35	78,000,000	APBD		35	81,120,000